

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PADA PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNY

IMPLEMENTATION OF THE FREEDOM OF LEARNING INDEPENDENT CAMPUS CURRICULUM ON THE EDUCATION POLICY STUDY PROGRAM AT UNY

Oleh: Iqbal Rino Nur Mutaqin, Universitas Negeri Yogyakarta
iqbal0250fip.2020@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Prodi Kebijakan Pendidikan UNY serta faktor pendukung serta penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Program Studi Kebijakan Pendidikan UNY. Subjek dalam penelitian yakni Kepala Departemen FSP, Koordinator MBKM Prodi, dosen, mitra MBKM, dan mahasiswa Prodi yang terlibat kegiatan MBKM. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, (1) Implementasi Kurikulum MBKM yang terlaksana di Prodi Kebijakan Pendidikan menunjukkan keberhasilan, dilihat dari (a) perencanaan; (b) pelaksanaan yang mencakup aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi; serta (c) mekanisme evaluasi. (2) Faktor pendukung dan penghambat: (a) Faktor pendukung dalam penelitian ini yakni komitmen dan dukungan yang diberikan oleh masing-masing pihak sehingga komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat dikategorikan baik; (b) Sedangkan faktor penghambat yakni munculnya berbagai pemahaman mengenai Kurikulum MBKM dikarenakan “merdeka belajar” pada seluruh pihak yang terlibat.

Kata kunci: implementasi, kurikulum, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Abstract

This study aims to describe the results of the implementation of the Freedom of Learning Independent Campus (MBKM) curriculum in the Education Policy Study Program UNY and its supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative approach method with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation conducted at the Education Policy Study Program UNY. The subjects in the study were the Head of FSP Department, MBKM Coordinator of Study Program, lecturers, MBKM partners, and students of Study Program who were involved in MBKM activities. The results showed that, (1) The implementation of the MBKM curriculum in the Education Policy Study Program shows success, seen from (a) planning; (b) implementation which includes communication aspects, resource aspects, disposition aspects, and bureaucratic structure aspects; and (c) evaluation mechanisms.

Keyword: implementation, curriculum, the Freedom of Learning Independent Campus (MBKM)

PENDAHULUAN

Pendidikan berperan penting dalam pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, kreatif, cakap, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung

jawab. Perkembangan zaman yang semakin mengglobal dan masyarakat yang semakin dinamis menuntut pendidikan dengan sistem yang mampu bertransformasi dan menyesuaikan dengan zaman. Salah satunya adalah kurikulum yang merupakan

inti dari sebuah proses dalam pendidikan. Kurikulum merupakan aspek yang berpengaruh secara langsung terhadap hasil pendidikan (Sukmadinata, 2017: 1).

Kurikulum pendidikan nasional dalam sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak sebelas kali (Sumarsih dkk., 2022). Perubahan kurikulum pada sistem pendidikan tersebut merupakan upaya pemerintah menciptakan bentuk yang ideal untuk menjawab persoalan pendidikan yang ada di Indonesia (Sumarsih dkk., 2022). Problematika dalam pendidikan yang selalu berubah mengharuskan adanya penyesuaian pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Tidak mengherankan, problematika tentang pendidikan menjadi persoalan “abadi” yang tiada henti-hentinya menjadi perbincangan para filsuf (Cathrin, 2019).

Memasuki era globalisasi dan internasionalisasi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mencetuskan konsep Merdeka Belajar yang kemudian dilanjutkan dengan konsep Kampus Merdeka. Pada dasarnya kampus merdeka menjadi konsep baru yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi (Muhsin, 2021; Wijayanto, 2021). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan perwujudan pembelajaran yang otonom dan fleksibel di perguruan tinggi, sehingga dapat menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kurikulum yang mewadahi suatu instansi perguruan tinggi untuk membentuk dan menyiapkan lulusan mahasiswanya yang mampu menguasai bidang ilmu dan teknologi, berkarakter serta

siap menghadapi tantangan dunia kerja (Puspitasari & Nugroho, 2021). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar tiga semester di luar program studi atau perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan di era revolusi industri 4.0. Tujuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar tiga semester di luar program studi atau perguruan tinggi yakni untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik *soft skills* ataupun *hard skills* (Kemendikbud, 2020).

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan pemerintah yang termaktub dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, khususnya Pasal 15 dan 18 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka resmi diluncurkan oleh Pemerintah pada tahun 2020. Implementasi Kurikulum MBKM harus dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi dan program studi (Kholik dkk., 2022). Perguruan tinggi diharapkan mampu mengembangkan serta memfasilitasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan pedoman yang telah disediakan.

Salah satu perguruan tinggi yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Yogyakarta dimulai dengan disusunnya kurikulum, mempersiapkan fasilitas kebutuhan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, penyusunan panduan

akademik, dan SOP mengenai Kurikulum MBKM untuk diimplementasikan di kalangan universitas hingga program studi. Program studi sebagai bagian dari universitas bertugas meneruskan dan mengimplementasikan program/kegiatan MBKM sehingga bisa direalisasikan serta ditindaklanjuti dalam bentuk jalinan kerjasama dengan berbagai stakeholders serta mitra yang terkait (Baharuddin, 2021).

Dilansir dari data mahasiswa yang mengikuti program dan kegiatan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 1.551 mahasiswa yang ikut serta dalam pelaksanaan program MBKM. Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu pelaksana Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki delapan fakultas dan 63 program studi. Salah satunya yakni program studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi yang turut andil dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan data kegiatan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka mahasiswa program studi Kebijakan Pendidikan tahun 2024 menunjukkan 45 mahasiswa program studi Kebijakan Pendidikan yang mengikuti program dari Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Data tersebut menunjukkan persentase kenaikan dari tahun 2023 yang terdapat 20 mahasiswa dan tahun 2022 sebanyak 14 mahasiswa program studi Kebijakan Pendidikan yang mengikuti program-program dari Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berdasarkan persentase kenaikan tersebut menunjukkan bahwa program studi Kebijakan Pendidikan memfasilitasi dan memberi dukungan bagi

mahasiswa untuk mengikuti berbagai program dari Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bentuk dukungan yang diberikan program studi Kebijakan Pendidikan yakni melalui sosialisasi, *workshop*, dan pembinaan.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilaksanakan pada 26 Januari 2024 dengan Koordinator MBKM Prodi Kebijakan Pendidikan sebagai narasumber, ditemukan beberapa masalah selama Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka diimplementasikan. Mahasiswa masih belum memahami pedoman MBKM yang sudah disediakan oleh pihak universitas/prodi dan keterlambatan memasukkan nilai, permasalahan tersebut sama dengan masalah yang dihadapi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (Asiah, 2021). Keterlambatan memasukkan nilai dapat diakibatkan dari faktor eksternal (mitra) ataupun dari faktor internal (mahasiswa dan/atau prodi), dimana hal tersebut berdampak pada KRS mahasiswa.

Selain itu, masih dibutuhkan sosialisasi lebih masif terkait dengan kurikulum MBKM, karena mahasiswa kurang memahami mengenai kurikulum MBKM itu sendiri. Kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai kurikulum MBKM juga dihadapi Program studi Kimia Universitas Nusa Bangsa (Wardhani dkk, 2022). Selanjutnya, sejalan dengan yang terjadi di FISIP UPN Veteran Jawa Timur (Puspitasari dan Nugroho, 2021), kesulitan konversi nilai dari program/kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa kedalam nilai mata kuliah prodi juga menjadi masalah yang perlu dikaji. Tidak ada kesesuaian waktu perkuliahan atau dengan kata lain mahasiswa menjalani tugas ganda juga menjadi permasalahan yang perlu

untuk dibahas lebih lanjut. Tugas ganda yang dimaksud dimana mahasiswa bersamaan dengan mata kuliah prodi tetapi juga mengikuti kegiatan/program dari Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas perlu dikaji lebih dalam mengenai implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program studi Kebijakan Pendidikan. Oleh karena itu, perlu analisis implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi Kebijakan Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Prodi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Prodi Kebijakan Pendidikan UNY, berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; sesuai dengan model teori implementasi Edward III. Selain itu, penelitian bertujuan untuk memperoleh faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Prodi Kebijakan Pendidikan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 Februari – 24 Mei 2024. Lokasi penelitian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus

Merdeka yakni Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Subjek Penelitian

Terdapat lima subjek dalam penelitian, diantaranya kepala departemen FSP, koordinator MBKM Prodi Kebijakan Pendidikan, dosen Prodi Kebijakan Pendidikan, mitra MBKM Prodi Kebijakan Pendidikan, dan mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan yang terlibat kedalam kegiatan/program MBKM. Pemilihan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni melalui pertimbangan bahwa informan/narasumber dianggap paham dan paling tahu mengenai implementasi Kurikulum MBKM di Prodi Kebijakan Pendidikan.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian yakni hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala departemen FSP, koordinator MBKM Prodi Kebijakan Pendidikan, dosen Prodi Kebijakan Pendidikan, mitra MBKM Prodi Kebijakan Pendidikan, dan mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan yang terlibat dalam kegiatan MBKM.

Data sekunder dalam penelitian bersumber dari profil program studi, buku panduan pelaksanaan kegiatan MBKM, data kegiatan MBKM Universitas dan Prodi, dan dokumentasi kegiatan MBKM dari mahasiswa. Peneliti sebagai instrumen utama dibantu dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan interaktif model dari Miles, Huberman, dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga akan menunjukkan kejenuhan data (Miles dkk, 2014: 31).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Studi Kebijakan Pendidikan merupakan salah satu Prodi yang memberikan respon positif terkait dengan dicanangkannya Kurikulum MBKM. Implementasi Kurikulum MBKM ini mendapatkan dukungan dari Prodi Kebijakan Pendidikan berupa *workshop* dan sosialisasi, baik kepada dosen maupun mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan.

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi Kebijakan Pendidikan UNY

1. Persiapan

Program studi kebijakan pendidikan mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengacu kebijakan pemerintah pusat, yakni Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, khususnya Pasal 15 dan 18 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dimulai dari Prodi Kebijakan Pendidikan melakukan penyesuaian dokumen kurikulum sesuai atas arahan dari universitas.

Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim MBKM Prodi dengan implementor utama yakni

Pengurus sekaligus Kepala Departemen FSP dan Koordinator MBKM prodi. Hal tersebut sejalan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan program atau kegiatan dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh individu/*stakeholder*, masyarakat, dan/atau kelompok pemerintah maupun swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan berpengaruh pada hasil akhir sebuah kebijakan (Ramdhani dkk., 2017: 5).

Pendekatan yang digunakan oleh Prodi Kebijakan Pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum MBKM yakni kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up. Kombinasi pendekatan tersebut menjadi pilihan karena memang kurikulum MBKM merupakan implementasi kebijakan yang partisipatif. Hal tersebut sejalan dengan proses implementasi Kurikulum MBKM di Prodi Kebijakan Pendidikan, dimana prodi tidak hanya sebagai pelaku kebijakan namun juga mengadaptasi kebijakan karena memang diberikan kebebasan “merdeka belajar”.

2. Pelaksanaan

Proses implementasi kebijakan tentunya tidak terlepas dari adanya suatu tahapan. Terdapat tiga tahapan implementasi yang dikemukakan oleh pemikiran Charles O Jones, yakni interpretasi, pengorganisasian, dan penerapan (Jones; Arwildayanto dkk., 2018: 83). Pertama yakni interpretasi, Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka mulai dicanangkan karena sebagai bentuk jawaban atas tuntutan

kompetensi lulusan perguruan tinggi dalam menghadapi dunia setelah perkuliahan. Sebagai respon positif, Prodi Kebijakan Pendidikan atas arahan dari Universitas Negeri Yogyakarta melakukan penyesuaian naskah kurikulum yang sebelumnya kurikulum 2013. Pada penelitian ini, hasil interpretasi berupa naskah kurikulum MBKM, pedoman, buku panduan, petunjuk pelaksana dan teknis, dokumen konversi mata kuliah, sumber daya, dukungan, dan sikap implementor.

Kedua yakni pengorganisasian, Prodi Kebijakan Pendidikan sudah menetapkan implementor kebijakan dalam mengimplementasikan kurikulum MBKM. Implementor kebijakan utama dalam implementasi Kurikulum MBKM yakni Pengurus dan Koordinator MBKM Prodi Kebijakan Pendidikan. Selanjutnya penetapan sumber daya keuangan serta penunjang lain sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Prodi Kebijakan Pendidikan.

Kemudian manajemen pelaksanaan, penyusunan buku panduan, pedoman, dan dokumen konversi sudah dilaksanakan oleh Prodi Kebijakan Pendidikan melalui rapat jurusan dalam waktu-waktu tertentu. Bersamaan dengan rapat jurusan atau koordinasi internal, Prodi Kebijakan Pendidikan juga selalu berkoordinasi dengan pihak Universitas Negeri Yogyakarta.

Ketiga yakni tahap penerapan, Berkaitan dengan penyedia layanan dalam bentuk hasil, Prodi Kebijakan Pendidikan bersama dengan Tim MBKM Prodi siap memberikan yang

terbaik kepada mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan yang terlibat dalam kegiatan MBKM. Selain melalui forum rapat *zoom cloud meetings*, juga dapat secara personal menghubungi koordinator MBKM atau dosen terkait.

Selanjutnya pelaksanaan implementasi Kurikulum MBKM pada Prodi Kebijakan Pendidikan berdasarkan aspek yang mengacu pada teori implementasi George C. Edwards III, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan Prodi Kebijakan Pendidikan pada implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yakni melalui komunikasi antar pelaksana kebijakan dan komunikasi dengan sasaran kebijakan. Edward III (dalam Anggara, 2014: 250–252) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila implementor paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan melalui komunikasi. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi, yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Komunikasi antar pelaksana kebijakan, sejauh ini sudah jelas dan konsisten. Komunikasi utama dilaksanakan oleh Prodi Kebijakan Pendidikan pada waktu rapat jurusan. Selain berkoordinasi dengan Kepala Departemen FSP, rapat jurusan juga menjadi sarana bagi pelaksana kebijakan terutama Koordinator MBKM untuk berkoordinasi mengenai Kurikulum MBKM bersama dengan dosen-dosen Prodi Kebijakan Pendidikan.

Pada sisi lain, koordinator juga menjalin komunikasi dengan mitra MBKM Prodi Kebijakan Pendidikan berkaitan dengan monitoring mahasiswa MBKM. Biasanya komunikasi dengan mitra dilaksanakan secara formal melalui laman resmi/*platform* MBKM, dan secara informal melalui telepon atau *zoom cloud meetings* apabila dirasa perlu.

Sedangkan komunikasi dengan sasaran kebijakan menunjukkan bahwa komunikasi dengan sasaran kebijakan dikomunikasikan oleh prodi melalui Koordinator MBKM Prodi Kebijakan Pendidikan secara langsung, melalui *WhatsApp*, dan juga forum *zoom cloud meetings*. Komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan atau mahasiswa ini sudah jelas dan konsisten.

Terutama berkaitan konversi, dosen-dosen Prodi Kebijakan Pendidikan sangat membuka lebar sarana komunikasi. Terdapat pula mahasiswa yang mendapatkan tugas ganda, selain terlibat dalam kegiatan dari program MBKM namun juga mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Mahasiswa yang melakukan tugas ganda, biasanya tidak konversi ataupun mengikuti mata kuliah wajib tempuh. Dosen Prodi Kebijakan Pendidikan secara terbuka kepada mahasiswa untuk berkomunikasi terkait dengan presensi, tugas mata kuliah, maupun ujian.

b. Sumber daya

Sumber daya dalam implementasi Kurikulum MBKM di Prodi Kebijakan Pendidikan ini yakni, sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan ketersediaan informasi. Edward III (dalam Anggara, 2014: 252–253)

mengemukakan bahwa sumber daya ini merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sebab, dengan adanya sumber daya yang cukup dan memadai, implementasi akan berjalan efektif.

Pertama, pada aspek sumber daya manusia, Prodi Kebijakan Pendidikan membentuk tim MBKM yang sudah ditunjuk oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Salah satu sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah staf (Edward dalam Anggara, 2014: 252). Implementasinya di Prodi Kebijakan Pendidikan, sudah terdapat Koordinator MBKM Prodi yang mengarahkan dan mengawasi berjalannya kegiatan MBKM.

Sumber daya manusia yang mencakup kualitas kecakapan pelaksana kebijakan dalam implementasi Kurikulum MBKM di Prodi Kebijakan Pendidikan sudah baik dan terpenuhi. Setiap pelaksana kebijakan mampu berkoordinasi dan bekerja sama satu sama lain dalam mengimplementasikan Kurikulum MBKM di Prodi Kebijakan Pendidikan. Sehingga Kurikulum MBKM dapat terimplementasi secara efektif.

Kedua, pada aspek sumber daya finansial, dana utama yang dialokasikan untuk Implementasi Kurikulum MBKM di Prodi Kebijakan Pendidikan bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Edward III (dalam Anggara, 2014: 252) mengemukakan bahwa sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi salah satunya yakni kewenangan.

Implementasi Kurikulum MBKM di Prodi Kebijakan Pendidikan, dana utama bersumber dari pemerintah pusat

atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada sisi lain, mitra MBKM tidak mendapatkan dana. Mitra MBKM lebih berfokus ke bantuan tenaga kerja. Sedangkan mahasiswa yang terlibat kegiatan MBKM, mendapatkan dana tambahan yang biasa dikenal dengan Bantuan Biaya Hidup (BBH) setiap bulan. Bantuan Biaya Hidup (BBH) juga bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sumber daya finansial atau kewenangan terkait kebutuhan dari suatu kebijakan yakni kurikulum MBKM di Prodi Kebijakan Pendidikan yang berupa penggunaan dan penyediaan dana sudah terpenuhi.

Ketiga, dari aspek ketersediaan informasi, terdapat pedoman, buku panduan, petunjuk teknis dan pelaksana, serta dokumen konversi. Sejalan dengan teori implementasi dari Edward III (dalam Anggara, 2014: 252) yang mengemukakan bahwa salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan adalah informasi.

Prodi Kebijakan Pendidikan meneruskan informasi kepada seluruh elemen pelaksana, informasi berupa pedoman, buku panduan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang bersumber dari Kemendikbud yang disesuaikan terlebih dahulu oleh Universitas Negeri Yogyakarta.

Selain itu, koordinator MBKM Prodi Kebijakan juga berinisiatif menyusun buku panduan sederhana bagi mahasiswa yang tentunya kedepannya akan dilakukan pengembangan dan penyegaran. Sumber informasi akan dibagikan oleh

prodi di awal tahun ajaran, sosialisasi kegiatan MBKM Prodi, atau mahasiswa bisa mengakses secara langsung melalui website resmi MBKM atau UNY.

c. Disposisi

Implementor kebijakan dalam mengimplementasikan kurikulum MBKM di Prodi Kebijakan Pendidikan menunjukkan sikap menerima dan mendukung penuh perubahan kurikulum. Edward III (dalam Anggara, 2014: 253) mengemukakan bahwa disposisi merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan.

Koordinator MBKM prodi selalu berkoordinasi dengan Pengurus MBKM mengenai kegiatan dari program-program MBKM. Selain itu, koordinator juga selalu menjaga komunikasi dan koordinasi dengan dosen-dosen. Koordinasi tersebut biasanya dilakukan dalam forum rapat jurusan. Kemudian dengan mitra MBKM Prodi Kebijakan Pendidikan, koordinator akan berkoordinasi dengan PIC/guru pamong. Koordinasi melalui telepon atau website/*platform* resmi dari MBKM.

Sedangkan dengan mahasiswa selaku sasaran kebijakan, koordinator MBKM prodi selalu menjaga koordinasi dan pengawasan. Koordinator akan berinisiatif mengadakan pertemuan rutin secara daring melalui *zoom cloud meetings* bersama mahasiswa. Mahasiswa juga dapat menemui Kepala Departemen FSP, Koordinator MBKM, dan juga dosen Prodi Kebijakan Pendidikan secara langsung apabila dirasa perlu.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka

Belajar Kampus Merdeka di Prodi Kebijakan Pendidikan dimulai dengan membentuk tim MBKM. Struktur birokrasi yang dikemukakan Edward III (dalam Anggara, 2014: 253) merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Struktur tim MBKM Prodi Kebijakan Pendidikan terdiri dari Kepala Departemen FSP sekaligus Pengurus MBKM, di bawahnya ada Koordinator MBKM Prodi yang mendapatkan SK dari universitas, kemudian dosen-dosen prodi, dan mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan sebagai sasaran Kebijakan.

Pelaksana kebijakan dalam struktur birokrasi Tim MBKM Prodi Kebijakan Pendidikan memiliki kemampuan yang fleksibel dan dinamis, yakni saling mendukung, bersinergi, dan membantu antar implementor. Implementasi Kurikulum MBKM di Prodi Kebijakan Pendidikan sudah dibentuk suatu struktur tatanan pembagian kerja untuk mengelola pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut guna menjalankan tugas lebih teratur serta tidak menghambat pelaksanaan dari kurikulum MBKM.

3. Mekanisme Evaluasi

Selama proses implementasi Kurikulum MBKM, tentunya Prodi Kebijakan Pendidikan melaksanakan evaluasi agar implementasi Kurikulum MBKM dapat terimplementasi dengan lebih baik. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menyajikan informasi secara akurat untuk menafsirkan hasil dari sebuah kebijakan atau program dan sebagai bahan menentukan keputusan baru (Kartowagiran, 2013: 11).

Rapat evaluasi dilaksanakan Prodi Kebijakan Pendidikan setelah kegiatan dari program-program MBKM sudah terlaksana, yakni di akhir semester. Pelaksanaan rapat evaluasi dimulai dari terkumpulnya informasi kegiatan MBKM prodi selama satu semester, baik dari Prodi Kebijakan Pendidikan, mahasiswa, dan mitra MBKM Prodi. Kemudian dianalisis dan disajikan dalam rapat evaluasi untuk dibahas, oleh Koordinator MBKM Prodi bersama dengan Kepala Departemen FSP dan dosen-dosen Prodi Kebijakan Pendidikan.

Hasil dari rapat evaluasi yakni berupa hasil implementasi Kurikulum MBKM yang menunjukkan keberhasilan serta keputusan baru agar kedepannya implementasi Kurikulum MBKM pada Prodi Kebijakan Pendidikan lebih baik dan lebih efektif. Keputusan baru tersebut yakni kontrak konversi kegiatan MBKM ke mata kuliah prodi yang disepakati di awal sebelum pelaksanaan kegiatan MBKM. Hal tersebut agar mahasiswa dan juga prodi tidak kesulitan dalam proses konversi mata kuliah yang berdampak pada KRS mahasiswa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kurikulum MBKM pada Prodi Kebijakan Pendidikan UNY

1. Faktor Pendukung

Selaras dengan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah efektif di Prodi Kebijakan Pendidikan, menunjukkan implementasi kurikulum tersebut didukung oleh beberapa faktor, diantaranya: adanya komunikasi yang

jelas dan konsisten antar pelaksana dan sasaran; alur birokrasi yang jelas, sistematis, dan terkontrol; dukungan penuh dan motivasi dari prodi; semangat dan kultur kolegalitas dari dosen prodi; kerja sama dari pengurus, koordinator, dan dosen-dosen prodi; Tim MBKM yang solid dan gerak cepat; keaktifan dan semangat mahasiswa; sosialisasi dan *workshop* pendukung; dan, motivasi besar dari mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan.

2. Faktor Penghambat

Meskipun implementasi Kurikulum MBKM telah berjalan efektif dan berhasil, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa faktor penghambat yakni pemahaman dan interpretasi yang berbeda-beda dari pihak pusat, universitas, pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan mengenai Kurikulum MBKM. Hal tersebut diakibatkan oleh pemberian kebebasan dalam tanda kutip “merdeka belajar” dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara holistik, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Prodi Kebijakan Pendidikan menunjukkan keberhasilan. Kurikulum MBKM direalisasikan dengan dukungan penuh dari Prodi Kebijakan Pendidikan. Keberhasilan juga dapat diukur dari meningkatnya animo mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan terhadap kegiatan program MBKM setiap semesternya. Bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak prodi berupa sosialisasi serta *workshop* mengenai kurikulum MBKM

kepada dosen dan mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan.

Rapat evaluasi yang dilakukan Prodi Kebijakan Pendidikan juga berdampak pada efektifnya implementasi Kurikulum MBKM. Keberhasilan dalam implementasi Kurikulum MBKM di Prodi Kebijakan Pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dari aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Faktor penghambatnya yakni perbedaan pemahaman karena “merdeka belajar” pada masing-masing pelaksana kebijakan.

Saran

1. Rekomendasi yang diberikan yakni perlu adanya sosialisasi atau koordinasi penguatan antara pihak pusat, universitas, prodi, mitra, dan mahasiswa mengenai pelaksanaan Kurikulum MBKM.
2. Rekomendasi selanjutnya yakni agar mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan yang terlibat kegiatan MBKM dapat meningkatkan dan menguatkan komunikasi dengan pihak Prodi Kebijakan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara., S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arwildayanto. Dkk. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Adaptif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asiah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar) (*Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar*).
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*,

- 4(1), 195–205. <https://e-journal.my.id/jsgp/article/view/591>
- Cathrin, S. (2019). Pancasila Sebagai Landasan Etis Pendidikan Di Indonesia. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2).
- Kartowagiran, Badrun. (2013). Evaluasi Dan Pengembangan Kurikulum. *Workshop Evaluasi Kurikulum Stab N Raden Wijaya*, 1–11.
- Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., Kartakusumah, B., Maufur, M., & Prasetyo, T. 2022. Impelementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berdasarkan Persepsi Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 738-748.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Muhsin, H. (2021). *Kampus Merdeka Di Era New Normal*. Dalam: A. Muslihat dkk. Masa Depan Kampus Merdeka & Merdeka Belajar: Sebuah Bunga Rampai Dosen. 143. Bintang Visitama Publisher.
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 276-292.
- Ramdhani, A., dan Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1).
- Sukmadinata, N.S. (2017). Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248-8258.
- Wardhani, G. A. P. K., Susanty, D., Oksari, A. A., Nurhayati, L., Nuranzani, A., & Faridha, F. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Program Studi Kimia Universitas Nusa Bangsa. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sains Indonesia (JPPSI)*, 5(1), 53-59.